

**PEMBERDAYAAN MASYARKAT DI DESA WISATA KALIBIRU
OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Fany Setyawan

NPP. 28.0725

Asdaf Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Setyawanfany766@gmail.com

ABSTRACT

The research titled *“Community Empowerment at Kalibiru Tourism Village by Kulon Progo Regency Tourism Office of Yogyakarta Special Region Province”* aims to analyze community empowerment at Kalibiru Tourism Village and to determine the inhibitory and supporting factors in the empowerment process as well as efforts made by Departement of Tourism Kulon Progo in empowering the community at Kalibiru Tourism Village. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. By data reduction, data presentation, and conclusion drawing, triangulation was used to analyze the data. The results of the research showed that various socialization, training, and mentoring have been conducted in collaboration with competent parties. However, there are still inhibitory factor such as tourism village management policy, lack of facilities and infrastructure, and people’s *mindset*. On the other hand, there are supporting factors including tourism potential with high selling value and the presence of tourism awareness groups (POKDARWIS). While the efforts made to improve empowerment is to cooperate with third parties and local governments as well as the provision of infrastructure supporting tourism. The advice from the author for Departement of Tourism Kulon Progo is to set the schedule of socialization, training, and mentoring activities continously, make tour packages at once by promoting tourism, and conduct the preparation of regulations related to tourism awareness groups in Kulon Progo Regency.

Keyword: Community Empowering, Tourism Village, Departement of Tourism

ABSTRAK

Penelitian dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Kalibiru Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”* bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberdayaan serta upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan tiangulasi melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berbagai sosialisasi, pelatihan, dan pembimbingan telah dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak yang berkompeten. Namun masih ada

faktor penghambat yang dihadapi seperti kebijakan pengelolaan Desa Wisata, kurangnya sarana prasarana, dan *mindset* masyarakat. Disisi lain terdapat faktor pendukung diantaranya potensi wisata dengan nilai jual tinggi dan adanya kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Sedangkan upaya yang dilakukan guna meningkatkan pemberdayaan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemerintah daerah serta penyediaan sarana prasarana pendukung kepariwisataan. Saran dari penulis untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan menetapkan jadwal kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembimbingan secara berkesinambungan, membuat paket wisata sekaligus dengan melakukan promosi pariwisata, serta menyusun peraturan terkait kelompok sadar wisata di Kabupaten Kulon Progo.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Dinas Pariwisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu potensi dan sumber aset yang menjadi sektor prioritas (*leading sector*) dalam program Nawacita yang dinilai mampu memberikan sumbangsih yang cukup berarti bagi negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat kaya dan beranekaragam, baik berupa keindahan alam maupun wisata budayanya. Pada saat ini, industri pariwisata menjadi sektor yang sangat menjanjikan, maka dari itu pemerintah Indonesia memiliki tekad untuk memberikan masukan pendapatan nasional yang tinggi melalui sektor pariwisata yang menjadi unggulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata telah dijelaskan maksud dari kegiatan kepariwisataan adalah bertujuan untuk mendorong kesempatan yang sama untuk berusaha dan mendapatkan peluang, serta mampu bertahan terhadap tantangan yang bersifat lokal, nasional bahkan global. Dengan ini, sangat jelas bahwa tujuan dari pembangunan pariwisata dimaksudkan untuk terciptanya lapangan pekerjaan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Masyarakat yang sejahtera tidak akan tercipta apabila masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran untuk berkembang dan juga apabila pemerintah tidak memberikan upaya dalam mengatasi permasalahan di masyarakat dengan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sudah menjadi tugas pemerintah melalui dinas pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata dengan memberdayakan masyarakat lokal.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang harus direalisasikan oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat desa menjadikan masyarakat lebih berdaya sehingga

pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa “Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius untuk memberdayakan masyarakatnya dengan berbagai kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan dan harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada di masing-masing daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan segudang pesona yang dapat menarik minat para wisatawan dengan wisata alam ataupun wisata buaatannya serta kebudayaannya yang masih sangat lekat dengan Keraton Ngayogyakarta yang masih bertahan hingga saat ini. Kegiatan pariwisata dikembangkan dengan tetap memegang teguh budaya Jawa, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak variasi seperti wisata budaya maupun wisata alam contohnya: Candi Prambanan, Malioboro, Gunung Merapi, Benteng Vredeberg, Desa Wisata Nglinggo, Desa Wisata Kalibiru, dan masih banyak lainnya. Destinasi-destinasi wisata tersebut tersebar di berbagai kawasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah di Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Kulon Progo memiliki beragam potensi pariwisata. Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo meliputi air terjun, goa, kebun teh, waduk, hingga perbukitan menoreh. Sejak tahun 2018, Kabupaten Kulon Progo memiliki proyek besar dalam memajukan sektor pariwisata. Salah satu proyeknya adalah Bedah Menoreh. Bedah menoreh merupakan program untuk mengembangkan pariwisata yang dilakukan dengan membangun jalan sejauh 65 kilometer yang dapat digunakan untuk mengakses destinasi-destinasi wisata unggulan yang berada di Perbukitan Menoreh. Terkait Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPKD) 2015-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang RIPKD Nomor 9 Tahun 2015 menjelaskan bahwa ”Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan dari segi pendapatan, baik pendapatan daerah, dan pembangunan daerah, bahkan menyerap investasi dan tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo, maka dari itu pariwisata dinilai sebagai salah satu pilar pembangunan daerah”.

Destinasi wisata yang kini mulai populer adalah desa wisata. Desa wisata merupakan sebuah desa yang terdiri dari masyarakat yang memiliki ciri khas, dan keunikan untuk menjadi daya tarik sebagai wisata yang dikelola dengan memberdayakan potensi bagi tumbuh dan berkembang pariwisata daerahnya. Keunikan dan karakteristik yang dimaksud antara lain: lingkungan yang memiliki nuansa alami, tradisi dan budaya yang masih tumbuh dan hidup berdampingan dengan masyarakat, sistem hubungan darah, dan sistem pertanian serta makanan khas. Sebagai salah satu destinasi wisata, desa wisata perlu memiliki fasilitas wisata yang memadai. Fasilitas tersebut antara lain: rumah penginapan atau yang kerap disebut *homestay*, sehingga pengunjung sangat merasakan sensasi sehari-hari dengan suasana pedesaan yang seadanya, arena aktivitas di alam serta berbagai kemudahan akomodasi bagi wisatawan. (Ariaani, 2017)

Kabupaten Kulon Progo sendiri sudah mulai melakukan pendampingan terhadap beberapa desa wisata dengan harapan bertumbuhnya perekonomian masyarakat sekitar dan mengurangi pengangguran. Terdapat 11 desa wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo diantaranya Desa Wisata Nglinggo, Desa Wisata Sidoharjo, Desa Wisata Banjaroya, Desa Wisata Banjarsari, Desa Wisata Purwosari, Desa Wisata Sermo, Desa Wisata Jatimulyo, Desa Wisata Banjararum, Desa Wisata Purwoharjo, Desa Wisata Sidorejo, dan Desa Wisata Kalibiru.

Desa Wisata Kalibiru adalah desa wisata yang berada di Perbukitan Menoreh. Wisata ini termasuk dalam area hutan lindung, dimana wisata ini berada pada ketinggian 450 mdpl. Mengangkat tema Hutan Kemasyarakatan Kalibiru, desa wisata ini dikelola oleh kelompok sadar wisata yang beranggotakan masyarakat sekitar. Pembangunan Wisata Alam Kalibiru merupakan inisiasi yang dicanangkan oleh Komunitas Lingkar di masyarakat sebagai bentuk jalan keluar atas permasalahan yang dialami masyarakat dalam pengelolaan hutan. Masyarakat mengklaim tidak bisa menikmati hasil tumpangsari yang pada awalnya menjadi andalan, dengan adanya wisata alam ini dapat dikatakan sebagai kegiatan alternatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan sasaran mensejahterakan masyarakat sekitar, desa wisata ini tetap menjaga kelestarian hutan disekitarnya. Melalui tampilan alam yang asri akan mampu menarik minat wisatawan untuk menjadikan Desa Wisata Kalibiru sebagai destinasi tujuan wisata mereka, sehingga jumlah pengunjung dapat meningkat dan tentunya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar yang turut ambil bagian dalam kepariwisataan di Desa Wisata Kalibiru. Berikut ditampilkan jumlah pengunjung yang berwisata di Desa Wisata Kalibiru selama 10 tahun terakhir.

Tabel 1
Jumlah Pengunjung Desa Wisata Kalibiru
Tahun 2010 s/d 2020

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2010	7.167
2.	2011	13.039
3.	2012	19.012
4.	2013	19.762
5.	2014	79.137
6.	2015	309.541
7.	2016	443.070
8.	2017	355.498
9.	2018	183.498
10.	2019	120.384
11.	2020	23.488

Sumber: Data Kelompok Sadar Wisata Kalibiru

Dari tabel yang telah dipaparkan mengenai data jumlah pengunjung di Desa Wisata Kalibiru selama 10 tahun terakhir, dimana jumlah pengunjung melonjak pada tahun 2015-2017, sebelum mulai mengalaminya penurunan pada 2 tahun terakhir apalagi ditambah dengan adanya pandemi yang melanda pada tahun 2020 ini. Dengan keadaan seperti ini tentu akan berdampak pada pelaku pariwisata. Keberadaan Desa Wisata Kalibiru dianggap sebagai anugerah bagi masyarakat sekitar karena membawa potensi usaha komersial dengan banyak wisatawan yang berwisata ke Desa Wisata Kalibiru sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang usaha.

Tabel 2
Jenis Usaha-Usaha di Desa Wisata Kalibiru

No.	Jenis Usaha	Jumlah/Unit
1.	Jasa Foto	10
2.	Warung Makan	20
3.	Penginapan (<i>Homestay</i>)	10
4.	Jasa Ojek (Jeep)	30

Sumber: Pengelola Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Kalibiru

1.2. Permasalahan

Berdasarkan tabel 2, di Desa Wisata Kalibiru hanya terdapat beberapa usaha yang ada, hanya ditemukan warung yang hanya menjajakan makanan dan minuman yang sama halnya seperti warung kelontong pada umumnya dan yang sangat disayangkan tidak ditemukan makanan khas daerah yang seharusnya menjadi potensi tersendiri bagi Desa Wisata Kalibiru. Tidak terdapat juga gerai tradisional yang menjajakan sesuatu yang menjadi hasil alam maupun kerajinan dari masyarakat sekitar desa wisata itu sendiri untuk dijajakan kepada para wisatawan. Di sisi lain, terdapat potensi budaya yang sebenarnya dapat dieksplorasi namun hal ini belum mampu dilakukan di Desa Wisata Kalibiru. Selain itu, sedikit pengunjung yang menggunakan fasilitas penginapan/*homestay* dan jasa ojek berupa jeep, hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan dari pengelola untuk mempromosikannya ditambah tidak adanya paket wisata yang tersedia. Dengan keadaan seperti ini, maka sangat perlu dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemajuan Desa Wisata Kalibiru.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan desa wisata. Penelitian Reni Vitasurya, Anna Pudianti, Anna Purwaningsih, Anita Herawati yang berjudul Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Desa Wisata Kalibiru Di D.I.Yogyakarta (Reni Vitasurya, Anna Pudianti, Anna Purwaningsih, Anita Herawati, 2015), menemukan bahwa kesadaran masyarakat merupakan hal utama dalam upaya pengembangan desa wisata dimana sangat dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Penelitian Yulita Anggraheni, Hermawan, dan Sujarwoto terkait pembangunan desa wisata yang mengarah ke dimensi baru keberlanjutan pembangunan menemukan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan sebagai subjek utama Desa Wisata Kalibiru. Meskipun demikian dalam pengembangan Desa Wisata Kalibru masih menemui berbagai kendala diantaranya terkait kurangnya promosi dan inovasi pada program (Yulita Anggraheni, Hermawan, dan Sujarwoto, 2018). Penelitian Aulia Intan Sari yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan guna memberikan kesadaran akan wisata demi pembangunan berkelanjutan, karena potensi Desa Wisata Kalibiru yang sangat menjanjikan bagi masyarakat sekitar (Aulia, 2020). Penelitian lainnya adalah penelitian Izchar Noor terkait peran obyek wisata dalam meningkatkan pendapatan menemukan bahwa Desa Wisata

Kalibiru sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar (Izchar, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru dengan menggunakan dimensi ataupun ruang lingkup teori pemberdayaan menurut Mardikanto & Soebiato (2017) dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik.

1.5. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran serta menganalisis mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data yang sudah didapatkan penulis melakukan analisis data dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah selama satu bulan di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan di Desa Wisata Kalibiru.

Dalam menganalisis permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penulis menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto & Soebiato (2017) dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik dengan 4 dimensi mencakup bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pelaku kepariwisataan. Sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Mardikanto dirumuskan menjadi 4 upaya pokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Dikatakan utama dan paling pertama karena bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo terus melakukan upaya pemberdayaan bagi pelaku usaha guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Wisata Kalibiru dan juga sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap proses pengembangan pariwisata.

Pembimbingan dan pelatihan diberikan kepada masyarakat pelaku usaha pariwisata diantaranya sopir jasa angkutan jeep, pemilik *homestay*, pelaku usaha kuliner dan tentunya pengelola yaitu Kelompok Sadar Wisata Kalibiru. Pelatihan dan pembimbingan selalu dilakukan oleh dinas pariwisata, seperti pelatihan bagi pemilik *homestay*, pemandu, dan angkutan wisata. Semua pelatihan yang diberikan dilihat dari keadaan di lapangan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga bekerja sama dengan pihak luar yang ahli di bidangnya agar pelatihan dapat berjalan baik dengan harapan hasil yang maksimal.

Seperti pemberian bimbingan teknis kepada sopir jasa angkutan jeep yang bekerjasama dengan IOF (Indonesia Offroad Federation), pembinaan dan pengawasan usaha jasa pariwisata yang dilakukan bersama DPMPT, Lembaga Sertifikasi Usaha, Lembaga Sertifikasi Profesi, pembekalan dan pelatihan peningkatan pelayanan yang bekerjasama dengan Pranataan Wisata Jogja, dan pelatihan manajemen *homestay* yang dilakukan dengan melaksanakan studi banding ke *homestay* bersertifikasi.

Pembekalan dan pelatihan, pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan dilakukan rutin pada setiap tahunnya, namun secara berkala karena keterbatasan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo.

2. Bina Usaha

Upaya pelaksanaan bina usaha masyarakat menuntut kesejahteraan ekonomi, sehingga dalam bentuk apapun yang tidak berhubungan dengan kesejahteraannya tentu saja tidak akan direspon dengan baik oleh masyarakat. Menurut Mardikanto, bina usaha mencakup beberapa aspek yang berpengaruh dalam berjalannya usaha atau produk pariwisata, diantaranya:

a. Permodalan

Pemilik usaha-usaha di Desa Wisata Kalibiru, memiliki masalah saat hendak memulai usaha wisata. Modal yang dibutuhkan untuk membuka sebuah usaha wisata tentu cukup besar, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang berasal dari keluarga menengah kebawah bahkan sebagian dari mereka ketika ingin meminjam modal. Hal ini sesuai dengan tutur Ibu Sutinah salah satu pemilik warung di Desa Wisata Kalibiru, “Membuka usaha warung ini dibutuhkan modal yang tentunya menjadi masalah. Untuk modal awal saja saya dapatkan dari bantuan koperasi Kelompok Sadar Wisata Kalibiru yang ada di sini. Selanjutnya pembangunan warung dan lainnya dilakukan secara swadaya pribadi”. Namun sejauh ini Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo hanya mampu memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan, pendampingan terkait legalitas usaha serta adanya program stimulus legalitas usaha gratis bagi usaha bersertifikasi.

Hal senada juga dirasakan oleh pemilik jasa angkutan jeep. Modal menjadi kendala dalam menjalankan jasa angkutan jeep di Desa Wisata Kalibiru. Namun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tidak dapat memberikan bantuan secara langsung berupa modal usaha, melainkan hanya dapat membantu dalam proses pelatihan peningkatan kemampuan, dan pembimbingan teknis serta pendampingan bagi sopir jasa angkutan jeep yang bekerja sama dengan IOF Yogyakarta.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang menunjang kegiatan wisata bagi para wisatawan, hal ini dapat mempengaruhi minat dan keinginan wisatawan untuk berkunjung. Di Desa Wisata Kalibiru terdapat sarana dan prasarana penunjang berupa *homestay* yang masih terbilang sederhana yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Namun yang sangat disayangkan jarang wisatawan yang datang berlibur dan memilih untuk menginap di *homestay* yang telah tersedia di Desa Wisata Kalibiru. Pada perkembangannya pemerintah mencoba mendorong dan meningkatkan usaha *homestay* yang telah berjalan dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan bahkan kegiatan studi banding ke usaha *homestay* yang sudah tersertifikasi sehingga usaha *homestay* dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Sektor usaha di bidang lain yakni di bidang akomodasi transportasi wisata atau angkutan jeep yang memfasilitasi para wisatawan dalam perjalanan menuju Desa Wisata Kalibiru. Pada kenyataannya, jeep diminati oleh pengunjung yang kendaraannya tidak memadai atau sopir yang tidak berani untuk melewati jalanan yang menanjak dan berkelok.

Namun banyak juga yang memilih untuk tidak menggunakan jasa angkutan dikarenakan tarif yang dipatok relatif mahal dan hanya sekali pulang dan pergi tanpa adanya semacam trip perjalanan. Sedangkan upaya pemerintah untuk mengembangkan akomodasi transportasi jasa angkutan jeep ini adalah dengan pembimbingan teknis berupa pelatihan kepada para sopir jeep mengenai cara berkendara yang baik dan penanganan pertama apabila terjadi kecelakaan

c. Peningkatan Promosi dan Pemasaran

Promosi dan pemasaran sangat diperlukan karena akan berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung. Karena pada saat ini hampir semua orang akan melihat referensi tujuan wisata mereka melalui media sosial sebagai rekomendasi wisata yang akan dikunjungi. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo terus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran melalui media sosial baik website, instagram, facebook maupun aplikasi berbasis android lainnya, hal ini dilakukan untuk lebih mengenalkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kulon Progo sehingga wisatawan dapat tertarik untuk berkunjung. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki aplikasi bernama Pesonaku yang berbasis android yang dapat di unduh melalui *playstore smartphone*. Hal ini sangat diperhatikan karena semakin besar usaha untuk mempromosikan dan memasarkan objek wisata maka akan semakin terkenal objek wisata tersebut dan akan lebih menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

3. Bina Lingkungan

Kegiatan wisata tidak dapat dipisahkan dari yang namanya lingkungan. Lingkungan yang asri dan nyaman menjadi penunjang berbagai macam kegiatan wisata seperti halnya di Desa Wisata Kalibiru yang pada awalnya merupakan hutan lindung kemasyarakatan. Kawasan Desa Wisata Kalibiru secara kebijakan menjadi tanggung jawab dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalibiru, dimana masyarakat juga turut menyadari bahwa usaha pariwisata yang mereka jalankan berpusat pada lingkungan. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga selalu menekankan melalui sosialisasi dan pengawasan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan kepada pengelola Desa Wisata Kalibiru yang kemudian dijalankan oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalibiru.

4. Bina Kelembagaan

Bina kelembagaan yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo di tingkat masyarakat dengan anggota yang terdiri dari para pelaku kepariwisataan sebagai penggerak Desa Wisata Kalibiru dengan sebagai berikut:

a. Pengembangan badan usaha yang sudah ada

Kelompok sadar wisata merupakan kelembagaan informal yang dibentuk oleh anggota masyarakat dan merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan sadar wisata. Salah satu tugas pokdarwis adalah mengajak masyarakat sekitar untuk lebih sadar akan potensi wisata yang dimiliki.

Kelompok Sadar Wisata Kalibiru terbilang aktif dalam pengelolaan dan upaya pengembangan kelembagaan serta pariwisata yang ada. Organisasi ini dibentuk dengan melibatkan masyarakat pelaku usaha wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dimudahkan dalam memberdayakan para pelaku usaha kepariwisataan dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalibiru ini, sehingga tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai dapat tepat sasaran.

b. Komponen aturan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Kalibiru

Desa Wisata Kalibiru dalam pengelolaannya dikelola langsung oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalibiru. Kelompok ini sudah bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dalam pengembangan kepariwisataan Desa Wisata Kalibiru, fungsi dari kelompok ini sudah berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Akan tetapi dalam kelompok ini belum memiliki peraturan daerah yang melandasi berjalannya kelompok sadar wisata itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaannya masih belum ada prosedur kegiatan yang jelas. sehingga perlu dibuatkannya prosedur kegiatan yang melandasi dan mengatur kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam sebuah peraturan daerah.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sekitar Desa Wisata Kalibiru selaku pelaku kepariwisataan. Penulis menemukan temuan penting yakni partisipasi masyarakat yang sangat kuat. Hal ini penulis dapati setelah melihat peran masyarakat sekitar dalam proses berkembangnya Desa Wisata Kalibiru. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan Desa Wisata Kalibiru yang bersifat swadaya. Keberadaan kelompok sadar wisata yang dikordinir warga sendiri mengakibatkan pelestarian lingkungan hutan kemasyarakatan tetap terjaga. Sama halnya dengan temuan Reni Vitasurya bahwa inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengembangan Kawasan Desa Wisata Kalibiru adalah dalam bentuk gotong-royong pembangunan. Adanya kesadaran yang tinggi terhadap potensi Desa Wisata Kalibiru juga yang menjadikan masyarakat tetap menjaga dan mengembangkannya (Reni Vitasurya, 2015).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Wisata Kalibiru tentunya juga memiliki beberapa aspek yang mendukung, diantaranya adalah potensi dengan nilai jual tinggi yang disajikan oleh Desa Wisata Kalibiru, sehingga Desa Wisata Kalibiru sempat menjadi *viral* di media sosial dan sempat diberitakan dalam media televisi. Hal lain yang menjadi aspek pendukung adalah adanya Kelompok Sadar Wisata Kalibiru sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin turut serta kedalam kepariwisataan di Desa Wisata Kalibiru, hal tersebut juga menjadi hal positif bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo untuk memkasimalkan pemberdayaan masyarakat.

Adanya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pelaku kepariwisataan sehingga mampu mengembangkan Desa Wisata Kalibiru yang tentunya akan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat secara tidak langsung layaknya penelitian Izchar Febrian Noor yang menemukan bahwa obyek wisata alam sangat berperan dalam meningkatnya pendapatan masyarakat (Izchar, 2016)

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo yakni intervensi Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sangat terbatas dikarenakan status pengelolaan Desa Wisata Kalibiru yang menjadi kewenangan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kalibiru, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi usaha jasa pariwisata.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, maka dapat penulis simpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalibiru tidak lepas dari campur tangan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan pihak-pihak berkompeten dengan harapan mendapatkan hasil yang mkasimal. Di sisi

lain Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga melakukan upaya pemasaran pariwisata khususnya Desa Wisata Kalibiru melalui media yang tersedia berupa Instagram, Facebook, dan website dinas pariwisata. Tidak lupa Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo juga membantu dalam berkembangnya kelembagaan yang ada yakni Kelompok Sadar Wisata Kalibiru.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mendapat hambatan berupa status pengelolaan Desa Wisata Kalibiru yang menjadi kewenangan Pokdarwis Kalibiru, tidak adanya semacam paket wisata penunjang dalam mengembangkan Desa Wisata Kalibiru dan *mindset* masyarakat yang belum sadar akan pentingnya sertifikasi usaha.

Disisi lain terdapat faktor pendukung diantaranya potensi wisata dengan nilai jual tinggi dan adanya kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Sedangkan upaya yang dilakukan guna meningkatkan pemberdayaan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan pemerintah daerah serta penyediaan sarana prasarana pendukung kepariwisataan. Saran dari penulis untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan menetapkan jadwal kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembimbingan secara berkesinambungan, membuat paket wisata sekaligus dengan melakukan promosi pariwisata, serta menyusun peraturan terkait kelompok sadar wisata di Kabupaten Kulon Progo.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Totok (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebianto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Meleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Meleong. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rahim, Firmansyah. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sedarmayanti. (2014). *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung: Refika Aditama.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soleh, Chabib. (2014). *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia.

- Sri Kuntari. (2009). *Strategi Pemberdayaan (Quality Growth) Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Kedua. Jakarta: Bina Reka Pariwisata

Jurnal:

- N I K Dewi, I. P. (2017). *Exploring the Potential of Cultural Villages as A Model of Community Based Tourism. International Joint Conference on Science and Technology (IJCST)*, P. 3.
- Vitasurya, V. Reni. Pudianti, Anna. Anna Purwaningsih. Anita Herawati. (2015). *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Desa Wisata Kalibiru Di D.I.Yogyakarta*. Seminar Nasional SCAN#6 Local Wisdom and Cultural Sustainability. 151-158.
- Intan, Aulia. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Di Wisata Alam Kalibiru Di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Angraheni, Yulia, Hermawan. dan Sujarwoto. (2018). *Understanding Community Participation within Sustainable Rural Tourism Development (A Case Study in Kalibiru Village, Yogyakarta Special Region, Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) FIA Brawijaya University. Vol 4. No. 4. PP 3012-309.
- Febrian, Izchar. (2016). *Peran Obyek Wisata Alam Kalibiru Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".